

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ancel, Mark, 2001, *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buaton, Tiarsen. 2016. “Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung” dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Dimiyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Lawrence M. Friedman, 2015, *The Legal System A Social Science Perspective*, Nusamedia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Goup, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono. 2015, “*Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia*”. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mulyana, Asep Nana. dkk , 2020, “*Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Dalam Perspektif Single Prosecution System*”, PT.Grasindo, Jakarta
- Supriyanta, 2010, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Unisiri Press, Solo.

Soekanto, Soerjono, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undng-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33)

C. Jurnal

Wahyudi, Misran. *“Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer Denpasar Dengan Berlakunya Rencana Tuntutan”*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4, No.3 2015

Muh. Irfan F, Syamsudin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin *“Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System”*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11 Nomor 1, Juni 2022

Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan, *“Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia”* Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa, 4 (2) (2022)

D. Internet

Algonz D.B. Raharja. Koordinasi: Pengertian menurut para ahli, 3 tujuan, jenis, serta beberapa contohnya.
<https://www.ekrut.com/media/koordinasi>

Rudi Pradisetia Sudirdja, “Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer,” *Bahasan.id*, last modified 2020, <https://bahasan.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer>